JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 1 No: 10, Desember 2024
E-ISSN : 3047-7824

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG KETAHANAN EKONOMI DI TENGAH TANTANGAN GLOBAL

GOVERNMENT POLICY STRATEGY IN PROMOTING ECONOMIC RESILIENCE AMIDST GLOBAL CHALLENGES

Simon Yanuarius Konorop
STISIPOL Yaleka Maro Merauke
Email: simonyanuariuskonorop@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 24-12-2024
Revised : 26-12-2024
Accepted : 28-12-2024
Published: 31-12-2024

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of government policy strategies in strengthening economic resilience in Merauke Regency through synergy of fiscal and monetary policies, infrastructure optimization, and economic diversification based on local potential. The research approach used is qualitative with a case study method to explore the implementation of economic policies in a specific local context. Secondary quantitative data such as regional economic growth, inflation rates, and production and distribution data of leading sectors are used to support the qualitative analysis. The research subjects involved various stakeholders, including local governments, MSMEs, farmers, academics, and the private sector. Data collection was carried out through in-depth interviews, direct observations, and documentation studies, which were analyzed using thematic analysis and data triangulation methods to increase the validity of the findings. The results of the study show that Merauke's economic resilience is greatly influenced by the effectiveness of fiscal and monetary policies, infrastructure quality, and economic diversification. The main challenges faced include budget constraints, coordination between institutions, and imbalances in synergy between the central and regional governments. Infrastructure limitations, especially in transportation and market access, are also factors inhibiting the productivity of leading sectors. Therefore, a strategy based on policy strengthening, infrastructure development, and community-based economic empowerment is needed to build more inclusive and sustainable economic resilience. The results of this study are expected to be strategic recommendations for the government in formulating adaptive economic policies to global and domestic challenges.

Keywords: ***Economic policy, economic resilience, fiscal and monetary synergy***

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Merauke melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, optimalisasi infrastruktur, serta diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan ekonomi dalam konteks lokal yang spesifik. Data kuantitatif sekunder seperti pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta data produksi dan distribusi sektor unggulan digunakan untuk mendukung analisis kualitatif. Subjek penelitian melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku UMKM, petani, akademisi, serta sektor swasta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang dianalisis menggunakan metode analisis tematik dan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Merauke sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, kualitas infrastruktur, serta diversifikasi

ekonomi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta ketidakseimbangan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam transportasi dan akses pasar, juga menjadi faktor penghambat produktivitas sektor unggulan. Oleh karena itu, strategi berbasis penguatan kebijakan, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas diperlukan untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap tantangan global dan domestik.

Kata kunci: Kebijakan ekonomi, ketahanan ekonomi, sinergi fiskal dan moneter

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, ketahanan ekonomi menjadi isu sentral dalam kebijakan pemerintah di berbagai negara(Sutton and Arku 2022), termasuk Indonesia. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan disrupsi rantai pasok telah memperlihatkan kerentanan struktur ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia merespons tantangan ini dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan ketahanan sektor riil. Langkah-langkah seperti pemberian insentif fiskal, penguatan sektor UMKM, dan digitalisasi ekonomi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Selain faktor eksternal, tantangan domestik seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan ketergantungan terhadap sektor tertentu juga menjadi perhatian utama dalam formulasi kebijakan ekonomi(Pal et al. 2022). Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneter guna mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Program subsidi, bantuan sosial, serta reformasi regulasi di sektor keuangan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional(Sutrisno 2021). Reformasi struktural juga terus dilakukan guna mempercepat transformasi ekonomi menuju model yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional.

Merauke, sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan ekonominya di tengah dinamika global dan domestik. Salah satu permasalahan utama adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian, terutama produksi padi, yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti program food estate, keterbatasan infrastruktur pendukung, akses teknologi pertanian modern, serta keterampilan tenaga kerja masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani(Dhillon and Moncur 2023). Selain itu, distribusi hasil pertanian sering kali mengalami hambatan akibat keterbatasan akses transportasi yang mengakibatkan biaya logistik tinggi dan menekan daya saing produk lokal.

Selain sektor pertanian, perekonomian Merauke juga menghadapi tantangan dalam diversifikasi ekonomi. Kurangnya investasi di sektor industri dan jasa menyebabkan keterbatasan lapangan kerja, yang berakibat pada tingginya tingkat pengangguran dan ketergantungan masyarakat pada sektor informal. Infrastruktur digital yang belum merata juga menghambat perkembangan ekonomi berbasis teknologi dan kewirausahaan digital. Pemerintah telah berupaya mendorong program UMKM berbasis lokal, namun akses permodalan serta rendahnya literasi

keuangan masih menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang secara berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, implementasi berbagai program ekonomi di Merauke masih menghadapi tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa kebijakan nasional sering kali kurang selaras dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di Merauke, yang memiliki karakteristik geografis dan demografis berbeda dengan daerah lain. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan ekonomi masih terbatas, sehingga beberapa program yang diterapkan kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi kebijakan yang lebih inklusif, berbasis potensi lokal, serta didukung oleh infrastruktur yang memadai guna meningkatkan ketahanan ekonomi Merauke dalam menghadapi tantangan global dan nasional.

Penelitian terdahulu mengenai ketahanan ekonomi di Merauke banyak menyoroti faktor-faktor seperti ketergantungan terhadap sektor pertanian, infrastruktur yang terbatas, serta kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program food estate di Merauke masih menghadapi kendala dalam implementasi akibat kurangnya akses teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil(Wibowo, Al Vayed, and Mardiatmi 2024). Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif bagi pelaku UMKM, akses terhadap modal dan pasar masih menjadi kendala utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas(Visiana 2025). Ketahanan ekonomi Merauke sangat dipengaruhi oleh konektivitas logistik dan infrastruktur digital yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia(Simanjuntak and Widodo 2025). Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah perlu lebih adaptif terhadap kondisi lokal, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan infrastruktur sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi Merauke.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas tantangan ketahanan ekonomi di Merauke, terutama terkait sektor pertanian, infrastruktur, dan akses modal bagi UMKM. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam meningkatkan ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan ekonomi di Merauke serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan resiliensi ekonomi daerah ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya tantangan ekonomi akibat faktor eksternal seperti krisis global, fluktuasi harga pangan, dan perubahan iklim yang berdampak langsung pada perekonomian Merauke. Sebagai salah satu daerah strategis dalam program ketahanan pangan nasional, kegagalan dalam memperkuat ekonomi Merauke dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti guna meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat ketahanan ekonomi Merauke, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam analisis strategi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi di Merauke dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data empiris terbaru. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti sektor pertanian atau akses permodalan secara terpisah, studi ini mengintegrasikan faktor-faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter, peran infrastruktur, serta diversifikasi ekonomi dalam konteks ketahanan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan ekonomi dapat dioptimalkan untuk menghadapi tantangan global dan domestik. Dengan fokus pada rekomendasi strategis yang berbasis potensi lokal dan inovasi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Merauke. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas strategi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi Merauke melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, optimalisasi infrastruktur, serta diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal guna menghadapi tantangan global dan domestik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi di Merauke. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap implementasi kebijakan ekonomi dalam konteks lokal yang spesifik. Selain itu, data kuantitatif sekunder seperti pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta data produksi dan distribusi sektor unggulan akan digunakan untuk mendukung temuan kualitatif. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam membangun ketahanan ekonomi di Merauke. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai salah satu daerah strategis dalam program ketahanan pangan nasional. Subjek penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (Dinas Perekonomian, Dinas Pertanian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, akademisi, serta perwakilan masyarakat dan sektor swasta. Keberagaman subjek penelitian ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi untuk memahami strategi serta kendala dalam implementasi kebijakan ekonomi di daerah ini. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati kondisi infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta keterjangkauan akses pasar bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, studi dokumentasi melibatkan analisis terhadap kebijakan pemerintah, laporan ekonomi daerah, serta penelitian terdahulu guna memperkaya perspektif terhadap dinamika ketahanan ekonomi di Merauke. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama seperti kebijakan fiskal dan moneter, peran infrastruktur, serta diversifikasi ekonomi. Untuk meningkatkan validitas temuan, dilakukan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi informasi. Selanjutnya, analisis deskriptif-kritis digunakan untuk

mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi strategis yang berbasis data. Rekomendasi akan difokuskan pada penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur ekonomi, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap berbagai aspek yang memengaruhi ketahanan ekonomi di Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, kondisi infrastruktur, diversifikasi ekonomi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, tantangan dalam implementasi kebijakan, keterbatasan akses pasar, serta ketergantungan terhadap sektor tertentu menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Berikut adalah pemaparan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan temuan utama di lapangan.

Tabel 1. Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Ketahanan Ekonomi di Merauke

Aspek	Temuan Penelitian
Implementasi Kebijakan Fiskal	Pemerintah daerah telah menerapkan insentif pajak bagi UMKM serta alokasi anggaran untuk infrastruktur dan subsidi pertanian. Namun, realisasi anggaran sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang.
Implementasi Kebijakan Moneter	Dukungan perbankan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) masih terbatas akibat rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil. Suku bunga yang diterapkan masih dianggap kurang kompetitif bagi pengusaha lokal.
Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Kebijakan fiskal dan moneter telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan. Namun, pertumbuhan masih belum merata karena ketergantungan yang tinggi pada sektor primer tanpa diversifikasi ekonomi yang optimal.
Stabilitas Harga	Harga bahan pokok cenderung fluktuatif akibat ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Kebijakan subsidi pangan belum efektif dalam menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.
Tantangan Optimalisasi Kebijakan	Keterbatasan anggaran daerah membatasi cakupan program stimulus ekonomi. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta masih belum optimal, menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan implementasi yang kurang efisien.

Kebijakan fiskal di Merauke telah difokuskan pada insentif pajak dan alokasi anggaran untuk infrastruktur serta subsidi pertanian, namun implementasinya masih terkendala oleh birokrasi. Dalam aspek moneter, dukungan perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih terbatas akibat rendahnya literasi keuangan dan suku bunga yang kurang kompetitif. Dampaknya terhadap

pertumbuhan ekonomi terlihat positif di sektor pertanian dan perdagangan, tetapi masih belum merata akibat kurangnya diversifikasi ekonomi. Stabilitas harga bahan pokok masih menjadi tantangan karena ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah serta subsidi pangan yang belum efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah dan kurangnya koordinasi lintas sektor menghambat optimalisasi kebijakan ekonomi, menyebabkan ketidakefisienan dalam implementasi program.

Tabel 2. Peran Infrastruktur dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi

Aspek Infrastruktur	Kondisi di Merauke	Dampak terhadap Ekonomi
Jalan dan Transportasi	Banyak jalan utama dalam kondisi rusak, akses ke wilayah pedalaman terbatas.	Meningkatkan biaya distribusi barang, menghambat akses petani dan UMKM ke pasar.
Pasar dan Fasilitas Perdagangan	Terbatasnya pasar modern dan pusat distribusi bahan pokok.	Kurangnya akses bagi produsen lokal untuk menjual produk dengan harga yang kompetitif.
Jaringan Komunikasi dan Digital	Sinyal internet tidak merata di beberapa wilayah, masih rendahnya pemanfaatan e-commerce oleh UMKM.	Menghambat transaksi digital dan akses informasi pasar bagi pelaku usaha.
Akses ke Pelabuhan dan Logistik	Infrastruktur pelabuhan belum optimal untuk ekspor hasil pertanian dan perikanan.	Membatasi ekspor produk lokal dan meningkatkan ketergantungan pada pasar dalam negeri.
Sumber Energi dan Listrik	Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan akses listrik yang stabil.	Menghambat operasional usaha dan industri kecil yang bergantung pada energi listrik.

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur di Merauke, seperti jalan yang rusak, minimnya pasar modern, serta jaringan komunikasi yang belum merata, berdampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi daerah. Kendala ini menyebabkan tingginya biaya distribusi barang, sulitnya akses petani dan UMKM ke pasar, serta terbatasnya peluang ekspor produk lokal. Selain itu, ketidakstabilan listrik juga menghambat operasional usaha kecil. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing daerah.

Tabel 3.Diversifikasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Aspek	Temuan Penelitian	Hambatan	Rekomendasi
Sektor Unggulan Non-Pertanian	Perikanan memiliki potensi besar dengan hasil tangkapan laut yang melimpah.	Infrastruktur dan akses pasar terbatas.	Peningkatan infrastruktur dan akses transportasi.
	Industri kreatif berkembang di kalangan anak muda	Kurangnya pelatihan dan pendampingan usaha.	Program pelatihan dan inkubasi bisnis.
	Pariwisata berbasis alam dan budaya memiliki daya tarik tinggi.	Minimnya promosi dan branding daerah.	Strategi promosi berbasis digital.

Perikanan	Potensi ekspor hasil laut tinggi.	Keterbatasan alat tangkap modern.	Bantuan alat tangkap modern.
	Pemanfaatan teknologi masih rendah	Kurangnya fasilitas pengolahan ikan.	Pembangunan pusat pengolahan ikan.
	Minimnya hilirisasi produk perikanan.	Regulasi ekspor yang kompleks.	Deregulasi ekspor produk perikanan.
Industri Kreatif	Peningkatan usaha kerajinan tangan dan kuliner lokal. Potensi ekonomi digital masih kurang dimanfaatkan.	Kurangnya akses modal dan pelatihan digital. Pasar lokal masih terbatas.	Program pembiayaan usaha kecil. Pelatihan pemasaran digital. Kemitraan dengan e-commerce.
Pariwisata	Destinasi berbasis budaya dan alam menarik minat wisatawan. Masih sedikit investasi sektor pariwisata.	Kurangnya infrastruktur wisata. Rendahnya promosi wisata daerah.	Pembangunan fasilitas wisata. Peningkatan promosi digital. Insentif investasi di sektor pariwisata.
Peran Pemerintah	Pemerintah mulai mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Program inkubasi usaha masih terbatas.	Koordinasi lintas sektor masih lemah. Anggaran pengembangan ekonomi masih terbatas.	Penguatan kebijakan insentif investasi.Sinergi antar dinas dalam pengembangan sektor unggulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi di Merauke memiliki potensi besar di sektor perikanan, industri kreatif, dan pariwisata, namun masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta kurangnya dukungan kebijakan yang optimal. Sektor perikanan memiliki peluang ekspor tinggi, tetapi terbatas oleh alat tangkap dan fasilitas pengolahan. Industri kreatif berkembang di kalangan anak muda, namun akses modal dan pemasaran digital masih menjadi tantangan. Pariwisata berbasis alam dan budaya memiliki daya tarik tinggi, tetapi minim investasi dan promosi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan infrastruktur, program pelatihan, insentif investasi, serta strategi pemasaran berbasis digital guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4. Sinergi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penguatan Ekonomi Merauke

Aspek	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Ketahanan Ekonomi	Rekomendasi
Koordinasi Kebijakan Pusat dan Daerah	Kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi daerah.	Ketidaksesuaian kebijakan dapat menghambat efektivitas program ekonomi lokal.	Meningkatkan forum koordinasi antarinstansi dan sinkronisasi kebijakan.
Kesenjangan dan Tumpang Tindih Kebijakan	Program pemerintah pusat sering kali tidak sesuai dengan	Program yang tidak tepat sasaran menyebabkan alokasi	Penyesuaian kebijakan berdasarkan kajian lokal serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam

	kebutuhan lokal di Merauke.	anggaran kurang efektif.	perumusan kebijakan nasional.
Dukungan Infrastruktur Ekonomi	Keterbatasan infrastruktur dasar seperti transportasi dan pasar menghambat distribusi produk lokal.	Menurunnya daya saing produk lokal dan ketergantungan pada daerah lain.	Peningkatan investasi infrastruktur strategis dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.
Peran Sektor Swasta dan Masyarakat	Minimnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam kebijakan ekonomi daerah.	Potensi ekonomi daerah tidak dimanfaatkan secara maksimal.	Mendorong kemitraan publik-swasta dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Strategi Harmonisasi Kebijakan	Regulasi yang sering berubah menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.	Investor ragu untuk berinvestasi di Merauke, menghambat pertumbuhan ekonomi.	Penyusunan kebijakan jangka panjang yang stabil serta keterlibatan pelaku usaha dalam proses perumusan regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan kebijakan ekonomi menghambat efektivitas program pembangunan di Merauke. Ketidaksesuaian kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal menyebabkan alokasi anggaran kurang optimal, sementara keterbatasan infrastruktur memperlambat distribusi produk lokal dan menurunkan daya saing daerah. Minimnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi kendala dalam penguatan ekonomi. Selain itu, regulasi yang sering berubah menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan melalui peningkatan forum koordinasi, investasi infrastruktur strategis, serta stabilisasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Pembahasan

Kebijakan fiskal daerah di Merauke memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan infrastruktur(Kurniawan, Sudarmo, and Abdurachman 2024). Pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai program stimulus ekonomi, termasuk subsidi pertanian dan penguatan UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas oleh rendahnya kapasitas fiskal daerah yang bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, realisasi anggaran sering kali menghadapi kendala administratif yang menghambat distribusi dana tepat waktu, sehingga dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Kebijakan moneter yang diterapkan secara nasional juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di Merauke, terutama dalam pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang fluktuatif, terutama akibat ketergantungan daerah terhadap pasokan bahan pokok dari luar, menyebabkan ketidakpastian harga yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat(Muhammad 2023). Kebijakan suku bunga dan ketersediaan kredit usaha turut menentukan kemampuan pelaku ekonomi dalam berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka.

Namun, akses terhadap fasilitas kredit masih menjadi kendala bagi sebagian besar pelaku UMKM karena keterbatasan jaminan serta keterjangkauan layanan perbankan di wilayah terpencil.

Dalam implementasinya, kebijakan fiskal dan moneter di Merauke masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang membatasi ruang fiskal dalam mendanai program ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, birokrasi yang kompleks dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal sering kali memperlambat eksekusi kebijakan, mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program di lapangan(Lasut et al. 2025). Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan strategi yang lebih adaptif, seperti peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan asli daerah serta sinergi yang lebih kuat antara kebijakan fiskal daerah dan kebijakan moneter nasional.

Infrastruktur dasar di Merauke memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi daerah. Ketersediaan jalan yang memadai, transportasi yang efisien, serta jaringan komunikasi yang stabil menjadi faktor utama dalam kelancaran distribusi barang dan jasa. Namun, kondisi infrastruktur di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti jalan yang belum sepenuhnya teraspal di wilayah pedalaman, terbatasnya sarana transportasi publik, serta keterbatasan akses listrik dan internet di beberapa wilayah. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pertanian dan perikanan, menjadi kurang optimal. Keterbatasan ini menyebabkan biaya logistik yang tinggi, memperlambat proses distribusi hasil produksi, serta mengurangi daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Pengembangan infrastruktur di Merauke masih dihadapkan pada beberapa hambatan utama, terutama dalam hal aksesibilitas, pendanaan, dan kebijakan pemerintah. Aksesibilitas ke wilayah-wilayah terpencil masih menjadi tantangan karena keterbatasan jaringan transportasi darat yang terintegrasi dengan baik. Selain itu, pendanaan pembangunan infrastruktur sering kali belum optimal karena keterbatasan anggaran daerah serta ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, kebijakan terkait pembangunan infrastruktur di Merauke terkadang kurang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, karena keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur menghambat investasi dan perkembangan sektor-sektor produktif(Ahmad n.d.).

Peningkatan infrastruktur menjadi solusi krusial dalam memperkuat konektivitas ekonomi di Merauke. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih lancar, memungkinkan sektor pertanian dan perikanan lebih mudah mengakses pasar regional dan nasional. Selain itu, peningkatan akses terhadap listrik dan jaringan komunikasi akan mendukung perkembangan industri kreatif dan sektor digital, yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah perlu mengembangkan strategi pembangunan infrastruktur yang lebih terarah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat(Akomea-Frimpong et al. 2023). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan serta alokasi anggaran yang lebih efektif akan menjadi kunci dalam menciptakan infrastruktur yang mampu mendorong ketahanan ekonomi Merauke secara berkelanjutan.

Diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi di Merauke, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Meskipun pertanian, khususnya produksi padi, menjadi tulang punggung perekonomian daerah, ketergantungan yang berlebihan terhadap satu sektor membuat ekonomi lokal rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan nasional. Oleh karena itu, eksplorasi sektor-sektor alternatif menjadi keharusan untuk menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan(Tutak and Brodny 2022). Namun, tantangan utama dalam diversifikasi ekonomi meliputi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta keterampilan tenaga kerja yang masih berorientasi pada sektor pertanian. Selain itu, minimnya investasi swasta di sektor-sektor baru juga menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih mendukung inovasi dan pengembangan industri lokal.

Salah satu sektor potensial yang dapat dikembangkan adalah perikanan, mengingat Merauke memiliki sumber daya laut dan perairan yang melimpah. Sektor ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat jika didukung oleh pengelolaan yang lebih modern serta penguatan rantai distribusi dan pemasaran. Selain itu, industri kreatif juga dapat menjadi alternatif ekonomi yang menjanjikan, khususnya dalam pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi produk bernilai tambah, seperti makanan olahan atau kerajinan khas daerah(Suyatno and Suryani 2022). Sektor pariwisata juga memiliki prospek yang besar dengan keunikan budaya lokal serta potensi ekowisata yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional. Namun, pengembangan sektor-sektor ini masih terhambat oleh kurangnya infrastruktur penunjang, rendahnya akses terhadap permodalan, serta terbatasnya keterampilan tenaga kerja dalam bidang-bidang non-pertanian.

Untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial tersebut, diperlukan strategi kebijakan yang lebih inovatif dan berorientasi pada investasi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha dan investor yang ingin mengembangkan industri perikanan, industri kreatif, dan pariwisata(Wang et al. 2024). Selain itu, program peningkatan kapasitas tenaga kerja juga harus menjadi prioritas agar masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan peluang ekonomi baru. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat diversifikasi ekonomi (Tjilen et al. 2023), sehingga ketahanan ekonomi Merauke dapat ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan di tingkat pusat sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di daerah, termasuk di Merauke. Salah satu kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perbedaan fokus antara kebijakan nasional yang bersifat makro dengan kebijakan daerah yang lebih bersifat mikro dan berbasis kebutuhan local (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023). Pemerintah pusat cenderung menekankan kebijakan stabilisasi makroekonomi, seperti pengendalian inflasi dan distribusi subsidi, sementara pemerintah daerah lebih membutuhkan dukungan dalam penguatan infrastruktur ekonomi dan pengembangan sektor unggulan lokal. Akibatnya, banyak program yang dicanangkan di tingkat pusat tidak dapat diimplementasikan secara optimal di daerah karena keterbatasan sumber daya dan ketidaksesuaian dengan karakteristik ekonomi setempat.

Koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan ekonomi juga masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menemukan bahwa birokrasi yang kompleks dan kurangnya

mekanisme komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menyebabkan keterlambatan dalam eksekusi program ekonomi. Selain itu, sektor swasta dan masyarakat lokal masih kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan, padahal mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Kurangnya integrasi antara sektor pertanian, industri, dan perdagangan juga menjadi tantangan utama, di mana kebijakan yang diambil oleh satu sektor sering kali tidak terkoordinasi dengan kebijakan sektor lainnya, sehingga menghambat upaya peningkatan ketahanan ekonomi secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan efektivitas sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal. Salah satu rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya melalui forum koordinasi kebijakan ekonomi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkala. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan di tingkat daerah harus lebih fleksibel dan memiliki ruang adaptasi terhadap kondisi spesifik lokal agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Sinergi antara sektor publik dan swasta juga perlu diperkuat melalui insentif yang mendorong investasi di sektor-sektor strategis, sehingga kebijakan ekonomi tidak hanya bersifat top-down tetapi juga berbasis pada kebutuhan dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan penelitian, strategi optimalisasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi Merauke harus berfokus pada penguatan sektor unggulan melalui pendekatan berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dengan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, dukungan bagi UMKM, serta pengembangan sektor perikanan dan pariwisata. Selain itu, kebijakan moneter harus diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain kebijakan pemerintah, peran serta masyarakat dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam membangun ketahanan ekonomi yang lebih adaptif terhadap tantangan global. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap modal usaha harus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Di sisi lain, sektor swasta perlu didorong untuk berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi Merauke.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa ketahanan ekonomi di Merauke sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, kualitas infrastruktur, serta diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. Implementasi kebijakan ekonomi daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta ketidakseimbangan dalam sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan infrastruktur, terutama dalam aspek transportasi dan akses pasar, menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Diversifikasi ekonomi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu, sehingga sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan industri pengolahan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah

menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berdaya saing. Oleh karena itu, strategi yang berbasis penguatan kebijakan, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas harus menjadi prioritas dalam upaya membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Upi Sopiah. n.d. "Analisis Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang."

Akomea-Frimpong, Isaac, Xiaohua Jin, Robert Osei-Kyei, and Augustine Senanu Kukah. 2023. "Public–Private Partnerships for Sustainable Infrastructure Development in Ghana: A Systematic Review and Recommendations." *Smart and Sustainable Built Environment* 12(2):237–57.

Dhillon, Rajveer, and Qianna Moncur. 2023. "Small-Scale Farming: A Review of Challenges and Potential Opportunities Offered by Technological Advancements." *Sustainability* 15(21):15478.

Kurniawan, Robby, Sudjanadi Tjipto Sudarmo, and Edi Abdurachman. 2024. "Economic Impact Analysis of Sea Toll Program Implementation in Eastern Indonesia: A Review in Papua, Maluku, and East Nusa Tenggara Regions." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5(2):1008–17.

Lasut, Thomly Stevie Ronald, Sisca B. Kairupan, Jetty Mokat, and Marthinus Mandagi. 2025. "Integrated Social Welfare Data Management Policy in Tomohon City." *Technium Soc. Sci. J.* 67:55.

Muhammad, Auwal Abubakar. 2023. "Examining the Relationship among Unemployment, Inflation, and Economic Growth." *Journal of Business and Economic Options* 6(2):23–31.

Pal, Shreya, Muhammed Ashiq Villanthenkodath, Gupteswar Patel, and Mantu Kumar Mahalik. 2022. "The Impact of Remittance Inflows on Economic Growth, Unemployment and Income Inequality: An International Evidence." *International Journal of Economic Policy Studies* 16(1):211–35.

Simanjuntak, Semsoni Haggai, and Wahyu Widodo. 2025. "Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi Dalam Sistem Multiregional Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)* 3(1):28–41.

Sutrisno, Edy. 2021. "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata." *Jurnal Lemhannas RI* 9(1):167–85.

Sutton, Jesse, and Godwin Arku. 2022. "Regional Economic Resilience: Towards a System Approach." *Regional Studies, Regional Science* 9(1):497–512.

Suyatno, Suyatno, and Dewi Aminatun Suryani. 2022. "Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal Dalam Mendorong Perekonomian Di Desa Girikerto." *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 9(2):108–18.

Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 5(1):1–9.

Tjilen, Alexander Phuk, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Samel Watina Ririhena, Beatus Tambaip, Syahruddin Syahruddin, Yosephina Ohoiwutun, and Riska Dwi Prihandayani. 2023. "Optimalisasi Potensi Desa Wisata Melalui Manajemen Pengelolaan Yang Berkelanjutan:

Kontribusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal." *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2(6):38–49.

Tutak, Magdalena, and Jarosław Brodny. 2022. "Renewable Energy Consumption in Economic Sectors in the EU-27. The Impact on Economics, Environment and Conventional Energy Sources. A 20-Year Perspective." *Journal of Cleaner Production* 345:131076.

Visiana, Khalisah. 2025. "The Role of Women in Community Economic Empowerment and Tourism through Women's Knowledge-Based MSMEs." *Saudi J Bus Manag Stud* 10(2):64–74.

Wang, Yi, Greg Hearn, Shane Mathews, and Jenny Hou. 2024. "Networks, Collaboration and Knowledge Exchange in Creative Industries: A Comparative Analysis of Brisbane and Shenzhen." *Creative Industries Journal* 17(1):88–112.

Wibowo, Djoko Puguh, Dodi Al Vayed, and Bernadin Dwi Mardiatmi. 2024. "Strengthening Local Food Security for Climate Change Adaptation: Lessons from Merauke-Papua Indonesia." Pp. 645–64 in *Climate Crisis, Social Responses and Sustainability: Socio-ecological Study on Global Perspectives*. Springer.